

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes) BERDASARKAN PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus Di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat
Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2021)**

Skripsi

SERLY RAHMA TIARA

NPM.1851030078



Program Studi Akuntansi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes) BERDASARKAN PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus Di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat
Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2021)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).**

Oleh :

SERLY RAHMA TIARA

NPM.1851030078

Jurusan : Akuntansi Syariah



Program Studi Akuntansi Syariah

Pembimbing I : H. Supaijo, SH., M.H.

Pembimbing II : Yetri Martika Sari, S.E., M.Acc., Ak., C.A.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahap penyusunan APBDes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian Studi Kasus yang mengamati bagaimana aparatur desa menerapkan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif masyarakat di Pemerintah Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data Primer diperoleh langsung dari responden yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan. Semua sumber data tersebut dijadikan bahan-bahan dalam mendeskripsikan penerapan *Good Governance* di desa Teba Bunuk.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk secara keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku menerapkan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipatif masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban dibuktikan dengan pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah. Dalam Perspektif Ekonomi Islam mengenai prinsip *Good Governance* sudah diterapkan cukup baik didasarkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yaitu *Siddiq* (jujur), *fathanah* (cerdas), *Amanah* (dapat dipercaya), dan *Tabliq* (transparan) dilihat dari nilai-nilai dasar yang telah dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Good Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Ekonomi Islam

ABSTRACT

The preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Teba Bunuk Village is guided by Permendagri number 113 of 2014 concerning village financial management. The APBDes preparation stage includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. This study aims to determine the application of the principles of good corporate governance in the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget based on the Islamic Economic Perspective. This research is a case study study that observes how village officials apply the principles of Transparency, Accountability, and Community Participation in the Teba Bunuk Village Government, Kotaagung Barat District, Tanggamus Regency.

This type of research uses a qualitative approach with data collection techniques of observation, interviews, and documentation. Primary data is obtained directly from respondents who are directly related to research problems, while secondary data in the form of theories and other supports are obtained from the literature. All of these data sources are used as materials in describing the implementation of Good Governance in the village of Teba Bunuk.

The results of this study state that the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Teba Bunuk Village as a whole has been carried out in accordance with applicable regulations applying the principles of transparency, accountability and community participation starting from the planning stage to reporting and accountability as evidenced by the implementation of the APBDes program to the community government. In the Islamic Economic Perspective, the principles of Good Governance have been implemented quite well based on the verses of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet SAW that is *Siddiq* (honest), *fathanah* (intelligent), *Amanah* (trustworthy), and *Tabliq* (transparent). seen from the basic values that have been translated into the principles of good governance.

Keywords : *Village Revenue and Expenditure Budget, Good Governance, Transparency, Accountability, Participatory, Islamic Economics.*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, 35131

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Serly Rahma Tiara
NPM : 1851030078
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2021).”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 April 2022

Penulis,



Serly Rahma Tiara

NPM.1851030078



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, 35131

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2021)


Nama : Serly Rahma Tiara
NPM : 1851030078
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Supaijo, S.H., M.H.
NIP.196503121994031002


Yetri Martika Sari, S.E., M.Acc., Ak., C.A.
NIP.198403282018012001

Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi Syariah


A. Zuliansyah, M.M.
NIP.19830222209121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2021).**” Disusun oleh Serly **Rahma Tiara**, NPM.1851030078, Progran Studi Akuntansi Syariah. Telah diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 18 Oktober 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Asriani, S.H.

Sekretaris : Andueriganta Fadhilli, S.E.,M.A.

Penguji I : Suhendar, M.S.Ak.,Akt.

Penguji II : H. Supaijo, S.H.,M.H.

Mengetahui,

dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Tulus Suryanto, M.M.,Akt.,C.A.
NIP.197009262008011008

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat kepada orang yang pantas menerimanya (ahli-nya). Dan apabila kamu mempertimbangkan suatu perkara hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baiknya nasihat. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”¹

(Q.S. An-Nisa' [4]:58)



¹ *Al-Qur'an* Kemenag, Surah An-Nisa' 58 n.d.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil Alamin, atas izin Allah SWT, penulis hanturkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa cahaya kebenaran. Maka dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta dan rasa hormat tak terhingga kepada kedua orang tuaku yaitu Umiku tersayang Ekawati dan Abiku tersayang Darwis. Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir hingga saya sudah sebesar ini dan selalu mendoakanku disetiap langkahku serta hal yang abi dan umi lakukan kepadaku. Semoga Abi dan Umi sehat selalu dan panjang umur sampai aku berhasil dan membuat kalian bangga kelak nantinya. Kakakku Ahmad Taufik dan adikku Ahmad Rifai yang selalu menemani dan menyemangatiku setiap waktu. Serta sahabatku Rida Juliyana yang selalu mensupport dan selalu ada untukku, teman temanku CIU dan Immortal serta sahabatku Malviana, Wiranti, Umu, Alya, Rohma, Riza, Oci, Wahid, Ready, Gusdani, Ahmad, Fikri, Maudya, Devi dan Reni taklupa juga guru belajarku Cici Faity Christy. Kalian adalah orang yang selalu ada disaatku terjatuh, menemani dan mendoakan agar semua dipermudah dan diperlancar hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung tercinta yang telah mendidikku baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Serly Rahma Tiara, dilahirkan di Kotaagung pada tanggal 6 September 1999, anak kedua dari pasangan Darwis dan Ekawati. Jenjang pendidikan penulis ialah sebagai berikut :

1. Pendidikan pertama dimulai dari TK Dharma Wanita selesai pada tahun 2006
2. Kemudian SD N 4 Kuripan Kotaagung dan lulus pada tahun 2006-2012
3. SMP N 1 Kotaagung dan lulus pada tahun 2012-2015
4. SMA N 1 Kotaagung dan Lulus pada tahun 2015-2018
5. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2021)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar dengan semestinya serta senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. A. Zuliansyah, S.Si., M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah yang selalu memberi arahan dan petunjuk selama masa studi di Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. H. Supaijo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik I dengan segala arahan, masukan dan amanat yang beliau sampaikan dalam membimbing skripsi ini.
4. Yetri Martika Sari, S.E., M.Acc., Ak., C.A selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dan meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak dan Ibu dosen serta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis selama masa studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Selamat Putra Yadin selaku Kepala Pekon Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus beserta staff dan jajarannya di Balai Pekon Teba Bunuk yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kakak dan adik tercinta Ahmad Taufik dan Ahmad Rifai yang luar biasa dalam memberikan dukungan dan doa tanpa hentinya semoga nantinya penulis dapat membuat kalian bangga dan menjadi contoh sebagai adik dan kakak.
8. Keluarga Bening's Indonesia yang telah menyemangati dan memberikan motivasi dan arahan yang sangat berguna bagi penulis.
9. Teruntuk seseorang lelaki yang selalu memberikan support, nasihat serta kalimat motivasi untukku. Terimakasih sudah menungguku hingga sampai dititik ini.
10. Kepada para sahabatku Immortal, CIU, Rida, Devi dan Reni, dan teman-teman saya di Akuntansi Syariah yang telah membantu dan mengajarkan banyak hal, semoga kelak kita menjadi seseorang yang beruntung dan berguna untuk orang banyak.

Bandar Lampung, 06 April 2022
Penulis,

Serly Rahma Tiara
NPM.1851030078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori <i>Stewardship</i>	33
B. Desa dan Pemerintah Desa	
1. Desa.....	34
2. Pemerintah Desa.....	34
C. <i>Good Governance</i>	38
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	38
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	44
E. Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	53
F. Kerangka Pemikiran	58
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek	
1. Sejarah Desa Teba Bunuk.....	59

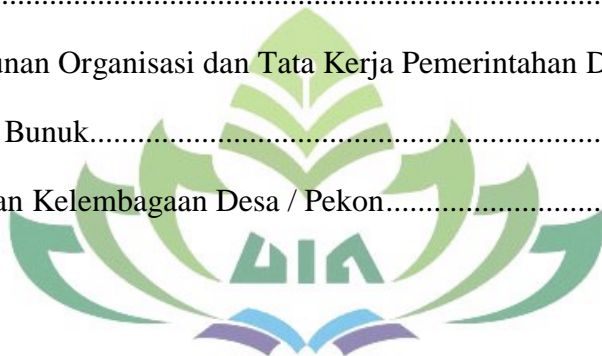
2. Visi dan Misi Desa Teba Bunuk	60
3. Kondisi Umum	61
a. Luas Wilayah dan Topografi	61
b. Demografi	61
c. Keadaan Sosial	65
d. Keadaan Ekonomi	66
e. Prasarana dan Sarana Desa	67
4. Kondisi Pemerintahan Desa.....	69
a. Pembagian Wilayah Desa.....	69
b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	71
c. Masalah dan Potensi Dari Potret Desa.....	72
d. Program Kegiatan dan Indikatif Pekon Teba Bunuk.....	78
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	79
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus	94
B. Analisis Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam	98
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	103
B. Rekomendasi	103
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Penelitian Terdahulu.....	12
3.1 Daftar Nama Kepala Pekon Teba Bunuk yang pernah Memimpin Pekon Teba Bunuk.....	58
3.2 Batas Pekon Teba Bunuk.....	60
3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga.....	61
3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur	61
3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	62
3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	63
3.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	64
3.8 Kesejahteraan Warga.....	64
3.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angka Pengangguran.....	65
3.10 Masalah dan Potensi dari Potret Desa.....	72
3.11 Masalah dan Potensi dari Kalender Musim	73
3.12 Masalah dan Potensi dari Kalender Musim	73
3.13 Masalah dan Potensi dari Kelembagaan Desa / Pekon.....	74
3.14 Target dan Realisasi Program Penyelenggaraan APBDes di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Model dan Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	29
1.2 Triangulasi dengan Sumber Data	31
1.3 Triangulasi dengan Teknik Pengumpulan Data	31
1.4 Triangulasi dengan Waktu Pengumpulan Data	32
2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	57
3.1 Letak Desa / Pekon Teba Bunuk Berdasarkan Letak Peta	70
3.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Teba Bunuk	71
3.3 Bagan Kelembagaan Desa / Pekon	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini dibuat dengan judul “Analisis Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2021).”

Penulis akan menjelaskan mengenai penegasan judul yang penulis jadikan sebagai judul penulisan skripsi, agar dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai judul dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami arti dari judul skripsi ini. Berikut penjelasan arti judul skripsi ini :

1. **Analisis** adalah proses pencarian jalan keluar atau pemecah masalah yang berawal dari dugaan akan kebenarannya, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²
2. **Implementasi** dalam KBBI diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan.³ Implementasi merupakan aktivitas, pelaksanaan, tindakan dengan adanya mekanisme suatu sistem, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan dari aktivitas atau kegiatan.
3. ***Good Governance*** sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political frame work* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.⁴

² Agung D.E, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2017), 50.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 327.

⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 18.

4. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintah desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu, APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya.⁵
5. **Perspektif** merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.⁶
6. **Ekonomi Islam** merupakan suatu ilmu pengetahuan untuk memandang, meninjau, meneliti dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi islam cara islami (berdasarkan ajaran agama islam).⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas penelitian yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah Analisis Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di desa Teba Bunuk

⁵ Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh: Read, 2011), 5.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), 1167.

⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 17.

kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2021).

B. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh Negara. Setelah disahkannya peraturan tersebut, desa diberikan wewenang yang besar untuk mengurus tata pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah Desa juga diharapkan agar lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya dengan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.⁸

Berdasarkan Permendes Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata kerja pemerintah desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2022. Dana Desa Sumber keuangan dana desa berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD) ini pemicu agar terciptanya program-program yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa, untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat dan demi tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata. Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mana pengelolaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerintah desa harus berhati-hati dalam mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas atau kekuasaan penggunaan anggaran ada pada seorang Kepala Desa.

⁸ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, *Desa Dan Pemerintah Desa Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Milik Desa* (BPKP, n.d.).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang kemudian direvisi menjadi Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Proses perencanaan pembangunan Desa dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang membahas tahapan program penyelenggaraan dan penyelesaian program. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, pemerintah desa perlu memperhatikan implementasi tata kelola yang baik (*Good Governance*).⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 73 ayat (2) untuk mencapai (*Good Governance*) maka dibutuhkan asas-asas akuntabel, transparan dan partisipatif yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.¹⁰

Pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Asas akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu untuk mencapai *Good Governance* dibutuhkan prinsip transparansi (*transparency*), dimana adanya keterbukaan

⁹ Undang-undang RI Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, *Pengelolaan Keuangan Direvisi Menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018* (Permendagri, 2014).

¹⁰ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, *Desa Dan Pemerintah Desa Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Milik Desa*.

mengenai laporan anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Selain laporan anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja desa, Pemerintah juga harus transparan mengenai segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu sistem informasi publik sehingga masyarakat umum bisa mengevaluasi kinerja pemerintah. Segala informasi terkait penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seharusnya disampaikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman Desa, Kantor Desa dan media lain yang dapat mendukung transparansi penggunaan dana APBDesa.

Partisipatif masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan desa yang lebih baik. Partisipatif merupakan keterlibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang.¹¹ Menerapkan prinsip partisipatif pada penyusunan APBDes bermakna bahwa masyarakat memiliki suara dalam pembentukan keputusan penyusunan anggaran dan juga masyarakat ikut dalam pengambilan keputusan anggaran Pemerintah Desa. Tanpa adanya prinsip partisipatif dari masyarakat maka program anggaran pendapatan dan belanja desa juga tidak akan berjalan dengan maksimal.¹²

Biasanya kendala umum sebagian Desa yaitu keterbatasan dalam pengelolaan keuangan berupa APBDes yang tidakimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Biasanya persoalan ini disebabkan oleh 4 (empat) faktor yaitu Pertama, Desa memiliki APBDesa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil. Kedua, ialah kesejahteraan masyarakat desa yang rendah. Ketiga, rendahnya

¹¹ Satria Mentari Tumbel, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan," *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 6 (2017): 161029.

¹² Badrus Zaman and Diah Nurdiwaty, *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, vol. 5, 2020.

dana operasional desa dalam menjalankan pelayanan. Dan terakhir adalah masih banyak program pembangunan masuk desa, tetapi hanya dikelola oleh Dinas.¹³

Selama tahun 2021 sudah banyak terjadi kasus-kasus terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap dana desa. Pada sekitar bulan Juni 2021 terdapat kasus Mantan Pj. Kakon Terdana Kotaagung Tanggamus menggelapkan Dana Desa sebesar Rp 251,8 juta. Berdasarkan data dari Humas Polres Tanggamus dan Lampungpro.co dan beberapa media lainnya meliput dalam wawancaranya Kasubbag Humas Polres Tanggamus Iptu M. Yusuf, mengatakan bahwa MS ditetapkan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pengelolaan keuangan pekon dan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai RAB, SPJ, dan LPJ tahun anggaran 2019. Kasus lain terjadi pada Pekon Banjar Manis, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Muflihan selaku Kepala Desa melakukan korupsi Dana Desa tahun anggaran 2018 & 2019 yang mengakibatkan Negara menderita kerugian sebesar Rp 609,3 juta. Adapun kasus terbaru lainnya pada bulan Agustus tahun ini yaitu dugaan penyalahgunaan Dana Desa sejak tahun 2015-2019 yang dilakukan oleh Kepala Pekon & mantan Pj. Pekon Kaur Gading, Kecamatan Pematangsawa, yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 531, 6 juta.¹⁴

Provinsi Lampung menjadi salah satu Provinsi yang mendapat pantauan oleh KPK saat Kepala Daerah tertangkap maka kasus korupsi pun akan merambah hingga pemerintahan desa/pekon, pada kasus korupsi yang terjadi oleh Mantan Pj. Kakon Terdana Kotaagung Tanggamus menggelapkan Dana Desa sebesar Rp 251,8 juta dan Kepala Pekon & mantan Pj. Pekon Kaur Gading, Kecamatan Pematangsawa, yang

¹³ Novira Sartika and M Lazuardi, "Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus : Desa Bantan Sari Dan Desa Deluk Kabupaten Bengkalis)," *Jurnal IAKP* 2, no. 1 (2021): 71.

¹⁴ Amiruddin Sarmin, "Gelapkan Rp 251,8 juta mantan Pj. Kakon Terdana Kotaagung Tanggamus dijebloskan ke BUI," Lampungpro.co, 2021., <https://lampungpro.co/post/34088/gelapkan-rp2518-juta-mantan-pj-kakon-terdana-kota-agung-tanggamus-dijebloskan-ke-bui>.

mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 531, 6 juta. Mantan kepala pekon ini terbukti telah mencairkan dan menyalurkan anggaran dana desa yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah, seperti tidak melibatkan bendahara keuangan pekon dalam hal pencairan.¹⁵

Kasus serupa terjadi di pekon Sukupadang, Kecamatan Cukuhbalak, Kabupaten Tanggamus. Oknumnya ialah Kepala Desa/Kepala Pekon yang melakukan tindak korupsi pemerintah provinsi tahun 2018 sebesar Rp 250.000.000.-, dan tak hanya korupsi dana Pemerintah Provinsi saja, Kepala Desa/Kepala Pekon ini pun menilap uang pembangunan masjid sebesar Rp 15.000.000.-,¹⁶

Kemudian dibalik banyaknya kecurangan dan tindak pidana korupsi diberbagai pekon di Kabupaten Tanggamus, Pekon Teba Bunuk menjadi sebagai pekon/desa yang dipilih oleh peneliti sebagai studi penelitiannya. Mengenai banyaknya kasus korupsi yang melibatkan oknum, tak terkecuali merambah kepada pemerintahan desa dan adanya peningkatan dana pencairan APBDes yang diperoleh pekon Teba Bunuk.

Menurut pandangan syariah *Good Governance* termasuk dalam ayat Al- Qur'an sebagai berikut :

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ﴿٤١﴾

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan Allah-lah kembali segala urusan.” (Q.S. Al-Hajj [22]: 41)

¹⁵ Jamhari Ismanto, “Korupsi Mantan Kepala Pekon Di Tanggamus Di Penjara” (Tanggamus,Lampung, 2020), WARTA9.COM., 2020, <https://warta9.com/korupsi-mantan-kepala-pekon-di-tanggamus-divonis-3-tahun-penjara/>.

¹⁶Amir Hamzah, ”Korupsi Dana Desa Rp 500 juta Oknum Kepala Pekon Jadi Tersangka Terancam 20 Tahun Penjara,” Kupas tuntas.co, “Korupsi Dana Desa Rp 500 Juta Oknum Kepala Pekon Jadi Tersangka Terancam 20 Tahun Penjara” (Tanggamus,Lampung, 2019), di akses pada 20 November 2021.

Good Governance pada ayat diatas menurut perspektif ekonomi islam yaitu penggunaan otoritas kekuasaan dalam mengelola pembangunan berfokus dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk masyarakat dalam terpenuhinya kebutuhan spiritual dan rohani yang disimbolkan dengan menegakkan shalat, terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi yang dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, dan terciptanya stabilitas politik dan keamanan yang diilhamkan dengan tindakan Ma'ruf Nahi Munkar.

Penelitian yang dilakukan oleh Novira Sartika dan M. Lazuardi tahun 2021 di Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bengkalis, menemukan bahwa Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes telah menerapkan asas transparansi mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun ada satu indikator yang tidak terpenuhi yaitu Pemerintahan Desa tidak mempublikasikan APBDes kepada masyarakat melalui media informasi seperti spanduk/*banner*. Pada implementasi asas akuntabel, Pemerintah Desa Bantan Sari dan Desa Deluk sudah memenuhi semua indikatornya mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Terkait implementasi asas partisipatif dalam pengelolaan APBDes pada Desa Bantan Sari dan Desa Deluk, Pemerintah Desa Bantan Sari sudah menerapkan dengan baik namun hal ini bertolak belakang dengan Desa Deluk yang mana Desa Deluk belum sepenuhnya menerapkan asas partisipatif dalam pengelolaan APBDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Febby Rosielita, Ni Luh Gede Sulindawati dan Ni Kadek Sirnawati tahun 2017 di Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu pada indikator transparansi pemerintah desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes secara lisan dan terbuka dalam forum diskusi dengan mengundang BPD dan masyarakat sebagai wujud keterbukaan, namun pertanggungjawaban APBDes secara tertulis belum dilaksanakan. Dalam indikator akuntabilitas pemerintah desa sudah membuat laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk tanggung jawab kepada BPD, Camat, dan kepada Bupati/Walikota, namun laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat hanya disampaikan secara lisan dalam forum. Dalam indikator partisipatif masyarakat sudah adanya forum dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terjadi *research gap* atau perbedaan hasil penelitian. Adapun *research gap* yang dimaksud adalah sebagai berikut : pada penelitian pertama dan kedua variable yang diteliti bukan hanya transparansi, namun juga akuntabilitas dan partisipatif masyarakat. Selain itu, diantara kedua penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan tempat dan waktu penelitian, sehingga kondisi objektif dan pertanggungjawaban APBDes pada masing-masing objek juga dapat berbeda. Oleh sebab itu, peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam. Selain itu juga mengingatkan bahwa dalam hal pengelolaan APBDes tidak menutup kemungkinan adanya resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi perangkat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan APBDes.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini kembali dengan mengambil judul “**Analisis Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2021)**”

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam sehingga dapat menghasilkan penelitian yang sempurna maka, penulis memandang permasalahan penelitian

hanya berkaitan dengan Analisis Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam di desa Teba Bunuk kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2021. Subfokus penelitian ini terdiri atas :

1. Profil Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.
2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus
3. Implementasi Prinsip *Good Governance* pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.

2. Untuk mengetahui Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dipaparkan oleh penulis maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan di bidang pengembangan ilmu Ekonomi terutama Akuntansi Syariah. Diharapkan pembahasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas melahirkan pemahaman yang baru mengenai bagaimana dalam praktik di lapangan, dalam pelaksanaan implementasi prinsip *Good Governance* pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada lembaga keuangan syariah.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan perannya secara efektif demi terciptanya pemerintahan desa yang lebih baik dan dapat memberikan informasi yang akurat berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan implementasi *good governance* di desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun

2020-2021)”. Tujuan penelaahan ini adalah untuk menghindari kesamaan dalam pembahasan serta untuk mengembangkan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan karya ilmiah ini.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Implementasi <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi kasus Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bengkalis) ¹⁷	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Bantan Sari dalam pengelolaan APBDesa secara umum sudah menerapkan asas transparansi mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun Pemerintah Desa Bantan Sari tidak mempublikasikan APBDes kepada masyarakat melalui media informasi seperti spanduk / banner. Hal ini bertolak belakang dengan Desa Deluk yang sudah menerapkan asas transpransi secara keseluruhan dalam pengelolaan APBDes.	1. Objek penelitian 2. Perspektif ekonomi Islam 3. Tahun penelitian

¹⁷Sartika and Lazuardi, “Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus : Desa Bantan Sari Dan Desa Deluk Kabupaten Bengkalis),” 69–84.

		<p>Dalam asas akuntabel, Pemerintah Desa keduanya sudah memenuhi indikatornya mulai dari tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam asas partisipatif pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Bantan Sari sudah menerapkan dengan baik namun hal ini bertolak belakang dengan Desa Deluk belum menerapkan sepenuhnya.</p> <p>Kendala yang dihadapi pemerintah Desa Bantan Sari dalam pengelolaan APBDesa yaitu lambatnya proses pencairan APBDes, regulasi yang tidak konsisten dan kurangnya koordinasi BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan kendala Pemerintah Desa Deluk yaitu perubahan harga barang setiap melaksanakan program kegiatan, perubahan cuaca/iklim, keterbatasan</p>	
--	--	---	--

			anggaran desa dan lambatnya pengesahan pagu anggaran.	
2	Implementasi <i>Good Governance</i> Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng) ¹⁸	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Telaga secara keseluruhan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pertanggungjawaban APBDes kepada masyarakat hanya secara lisan melalui suatu forum diskusi yang diadakan Pemerintah Desa Telaga dan prinsip-prinsip <i>good governance</i> pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa telaga sudah diterapkan cukup baik oleh pemerintah desa telaga meskipun masih ada prinsip yang belum diterapkan secara optimal, yaitu prinsip transparansi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Perspektif Ekonomi Islam 3. Tahun penelitian 4. Prinsip <i>Good Governance</i>

¹⁸ Febby Rosielita, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, and Ni Kadek Sinarwati, "Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng)," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 8, no. 2 (2017).

			akuntabilitas.	
3	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa ¹⁹	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses pengelolaan alokasi dana desa sudah perencanaan sudah menerapkan transparansi. pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah dikatakan akuntabel, transparan dan partisipatif masyarakat dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana Desa Ngombakan sudah dikatakan akuntabel dan transparan tetapi masih mengalami keterlambatan dalam penyusunan pertanggungjawaban.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Perspektif ekonomi Islam 3. Tahun penelitian
4	Analisis Implementasi <i>Good Governance</i> Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. ²⁰	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APB Nagari terdapat permasalahan pada tahap perencanaan yaitu terlambatnya dalam penetapan APB Nagari dikarenakan lamanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Perspektif ekonomi Islam 3. Tahun penelitian

¹⁹Zaman and Nurdiwaty, *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, 5:(2020).

²⁰ Gustiman Candra, Herlina Helmy, and Nayang Helmayunita, "Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 1 (2019): 64–77.

			<p>peraturan dari kabupaten ke nagari. Tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>Implementasi prinsip-prinsip <i>good governance</i> pada pengelolaan APB Nagari sudah dilaksanakan cukup baik oleh pemerintah Nagari. Prinsip partisipasi diterapkan dalam bentuk adanya masyarakat ikut serta dalam menentukan RPJM Nagari dan RKP Nagari mulai dari rembuk kampung, masnag dan musrembag RKP dan RPJM dalam pengawasan pelaksanaan APB Nagari. Prinsip Akuntabilitas dan transparansi dalam bentuk realisasi pelaksanaan dan APB Nagari disampaikan kepada masyarakat dalam forum musyawarah, spanduk, baliho dan papan pengumuman</p>	
--	--	--	---	--

			yang mudah diakses masyarakat.	
5	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sebagai Instrumen Mewujudkan Good Governance ²¹	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Akuntabilitas alokasi dana desa di kabupaten Brebes diambil kesimpulan yaitu yang pertama, tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Brebes sudah menerapkan prinsip transparansi, partisipasi dan responsif. Tahap kedua, tahap pelaksanaan ADD di Kabupaten Brebes proses pencairan Alokasi Dana Desa pada tahun 2017 dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama sebesar 80% dan tahap kedua 20%. Ketiga, tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Brebes terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Perspektif ekonomi Islam 3. Tahun penelitian

²¹ Andri Widiyanto et al., "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sebagai Instrumen Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Kecamatan Brebes)," *ACCOUNT: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan* 5, no. 2 (2018).

			<p>Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahap yang terakhir, yaitu tahap pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk evaluasi atas pengelolaan alokasi dana desa yang mana evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan Dana Desa / Alokasi Dana Desa tidak terjadi penyimpangan.</p>	
--	--	--	--	--

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan judul “Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.” dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang diteliti. Objek pada penelitian sebelumnya meneliti di Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bengkalis, sedangkan penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Desa Teba Bunuk. Perbedaan kedua terletak pada perspektifnya. Penelitian sebelumnya menggunakan perspektif secara umum sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam. Perbedaan lainnya terletak pada tahun penelitian, penelitian sebelumnya peneliti meneliti pada tahun 2021 sedangkan penelitian ini menggunakan tahun terbaru yaitu 2022.

Pada penelitian yang berjudul “Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.” Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan datanya menggunakan data primer dan sekunder. Pada penelitian Implementasi *Good*

Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan penelitian dapat dilihat perbedaan terletak pada objek yang diteliti, pada objek sebelumnya meneliti di Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng sedangkan penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus. Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam. Perbedaan lainnya terletak pada tahun penelitian, penelitian terdahulu meneliti pada tahun 2017 sedangkan pada penelitian ini dilakukan peneliti tahun 2022. Pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan prinsip yaitu menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, prinsip aturan hukum, partisipasi masyarakat dan efektivitas dan efisiensi. Sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan asas atau prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yaitu pada objek penelitian. Objek penelitian sebelumnya di Desa Kampung baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objeknya di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus. Dan juga sama seperti penelitian sebelumnya perbedaannya terletak dalam perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian yang sedang diteliti menggunakan perspektif ekonomi Islam. Perbedaan lainnya terletak pada tahun penelitian, pada penelitian sebelumnya penelitian dilakukan pada tahun 2020.

Penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.” dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang diteliti. Objek pada penelitian sebelumnya meneliti di Desa Nagari pada Koto Nan Tigo Utara Surantih dan Koto Nan Tigo Selatan Surantih, sedangkan penelitian ini yang

menjadi objeknya adalah Desa Teba Bunuk. Perbedaan kedua terletak pada perspektifnya. Penelitian sebelumnya menggunakan perspektif secara umum sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam. Perbedaan lainnya terletak pada tahun penelitian, peneliti sebelumnya pada tahun 2019 sedangkan pada penelitian ini pada tahun 2022.

Penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sebagai Instrumen Mewujudkan *Good Governance*.” Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan datanya menggunakan data primer dan sekunder. Pada penelitian dengan penelitian dapat dilihat perbedaan terletak pada objek yang diteliti, pada objek sebelumnya meneliti di Kabupaten Brebes sedangkan penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus. Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam. Perbedaan lainnya terletak pada tahun penelitian, penelitian terdahulu meneliti pada tahun 2018 sedangkan pada penelitian ini dilakukan peneliti tahun 2022.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada fakta sosial dan alamiah dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, data deskriptif, tidak berdasarkan analisis statistik dan dilaporkan dalam bentuk naratif.²² Penelitian kualitatif biasanya merujuk pada penggunaan data kualitatif

²² S.hermawan and A. Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Media Nusa Creative, 2016), 37.

(wawancara, observasi dan dokumentasi) yang diolah peneliti.²³

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang dengan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁴

Selain penelitian di lapangan juga dilakukan penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lain.²⁵

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersikap deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskriptif*) lengkap tentang sesuatu yang sedang diteliti. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengertian deskriptif yang penulis maksud adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa di lapangan. Adapun tujuan dari penelitian pendekatan deskriptif adalah untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, serta menganalisa kondisi yang ada dan sedang terjadi.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dimana kegiatan penelitian akan dilakukan oleh penulis yaitu pada Pekon atau Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus. Dalam penelitian ini peneliti tertarik dengan

²³ A. Kamayanti, *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi* (Malang: Penerbit Peneleh, 2002), 14.

²⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D* (Alfabet, 2016), 213.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 29.

²⁶ H. Moh.Pobundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis, Cet. Pertama* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 226.

desa ini karena ingin mengetahui apakah di desa ini sudah menerapkan tiga asas atau prinsip *good governance* yaitu asas akuntabilitas, asas transparansi, dan asas partisipasi dalam penyusunan APBDes.

3. Subyek Penelitian

Subyek pada penelitian merupakan sasaran pengamatan dan informan suatu penelitian yang diadakan peneliti. Subyek pada penelitian adalah dimana semua orang terlibat dalam kegiatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Pekon atau Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus. Adapun subyek atau informan yang paling mengetahui dan terlibat dalam kegiatan yang akan diteliti meliputi Kepala Desa atau Pekon, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Umum / TU, Kadus I, Kadus II, Kadus III, Staff Operator, Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial).

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh yang bersangkutan yang memerlukannya.²⁷ Dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari lokasi penelitian, yang didapatkan dengan wawancara melalui Kepala Desa/Pekon, Sekretaris Desa, Bendahara Desa untuk mengetahui seberapa besar pemahaman pengelola keuangan desa yang baik dan benar. Selain itu, penelitian ini juga didapatkan melalui hasil observasi dalam bentuk foto, teks serta rekaman suara yang dilakukan saat wawancara. Data ini merupakan data utama yang penulis akan gunakan untuk mencari

²⁷ MM Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian, Cet Pertama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

informasi mengenai peran pemerintah desa dalam menerapkan implementasi prinsip *good governance* terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

b. Data Sekunder

Selain data primer sebagai pendukung penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen²⁸

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada ada di lembaga-lembaga ataupun instansi yaitu dari pemerintahan desa/pekon Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dengan kualitas tertentu yang akan diamati dan diteliti oleh penulis.²⁹ Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang diteliti, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh aparatur pemerintahan Pekon Teba Bunuk kecamatan Kotaagung Barat yang berjumlah 13 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai obyek penelitian dengan cara hanya mengganti sebagian dari populasi dan menarik

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2012), 141.

²⁹ Superdi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UIII Press, 2005), 101.

generalisasi dari hasil penyelidikan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik dimana peneliti menentukan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.³⁰ Sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang merupakan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan.

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada Pekon Teba Bunuk kecamatan Kotaagung Barat yang berjumlah 4 orang responden yang. Dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi yang disebut dengan Teknik Sensus.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data maka ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang akan diperlukan dalam menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian dan untuk melakukan evaluasi dalam pengukuran terhadap aspek tertentu sebagai umpan balik dalam pengukuran tersebut.³¹ Oleh karena itu, observasi dalam proses pengumpulan data peneliti harus melakukan pengamatan sekaligus pencatatan terhadap fenomena yang digali

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet, VII* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 55.

³¹ Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 30.

informasinya. Tujuannya untuk mengamati lokasi penelitian secara langsung dengan melihat seberapa jauh implementasi prinsip *Good Governance* pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diterapkan di desa Teba Bunuk kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data interview dari responden dengan wawancara secara langsung yang dilakukan dua orang atau lebih melalui *face to face* antara *interviewer* dan *narasumber*. Yang bertujuan untuk melakukan pengumpulan data dengan teknik tanya jawab secara langsung kepada tokoh masyarakat ataupun sekelompok orang untuk mengumpulkan informasi mengenai topik permasalahan.³²

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.³³ Adapun penelitian ini penulis akan mewawancarai yaitu Kepala Desa atau Pekon, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Umum / TU, Kadus I, Kadus II, Kadus III, Staff Operator, Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial) di desa Teba Bunuk untuk memperoleh data yang kuat penulis juga akan mewawancarai ketua BPD yang berasal dari Desa Teba Bunuk untuk mengetahui sejauh mana dalam mengimplementasikan prinsip *Good Governance* dalam Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.

³² Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 152.

³³ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Cet Ke-20* (Bandung: Alfabeta, 2014), 138.

c. Dokumentasi

Dalam metode ini merupakan pelengkap dari metode sebelumnya yaitu metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun pengertian dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.³⁴ Dokumentasi juga bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang atau lembaga lainnya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi, wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumenter seperti foto-foto, video, hasil rekaman, catatan harian, laporan, serta website resmi lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁵ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁶ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

³⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 160.

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 334.

³⁶ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian,

permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

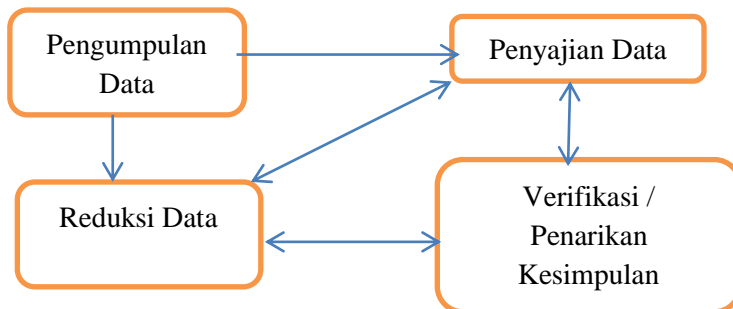
2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1.1
Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

8. Teknik Keabsahan Data atau Validitas Data

Keabsahan Data atau Validitas Data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap hal tersebut.³⁷ Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif.³⁸ Artinya untuk menarik suatu kesimpulan yang diperlukan sebagai sudut pandang berbeda.

Memahami pentingnya keabsahan data atau validitas data pada sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting. Pada penelitian kualitatif, keabsahan atau validitas merupakan tujuan bukan hasil, bukan sesuatu yang dibuktikan atau dianggap biasa-biasa saja. Sehingga pada pengumpulan data kualitatif, peneliti harus menggunakan validitas data agar data yang diperoleh tidak valid (cacat).

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 330.

³⁸ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), 78.

Menurut Sugiyono teknik keabsahan data atau validitas data dalam penelitian kualitatif agar dikatakan valid dalam pengumpulan datanya harus menggunakan : pertama, uji *credibility* (validitas internal) derajat kepercayaan, kedua uji *transferability* (validitas eksternal) keteralihan, ketiga uji *dependability* (reliabilitas) kebergantungan, dan uji *confirmability* (objektivitas) kepastian.³⁹

Pertama, Uji validitas internal (*credibility*) kepercayaan dilaksanakan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (*member check*). Kedua, Validitas eksternal (*transferability*) keteralihan dalam penelitian kualitatif agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif, maka peneliti dapat membuat laporan yang memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Ketiga, reliabilitas (*dependability*) kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Keempat, Objektivitas (*confirmability*) kepastian adalah menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Teknik yang digunakan dalam keabsahan data penelitian ini menggunakan uji validitas internal (*credibility*) derajat kepercayaan.

Teknik pemeriksaan data dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check*. Kriteria keabsahan data menggunakan metode :

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan rinci. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara sistematis dan pasti.

2. Triangulasi

Menurut Wiersma, triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan ulang data dari

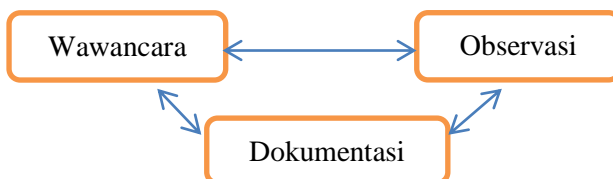
³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hal 270.

sumber lain dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi di bedakan menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.⁴⁰

Teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek ulang data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini triangulasi sumber untuk mendapatkan data yaitu melalui wawancara orang terdekat subjek. Peneliti memilih aparatur desa sebagai informan yang akan memberikan data yang peneliti gunakan sebagai alat *cross check*. Triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini melakukan observasi yang berkaitan dengan subjek dan lingkungannya. Sedangkan dalam triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda yaitu pagi, siang dan sore.

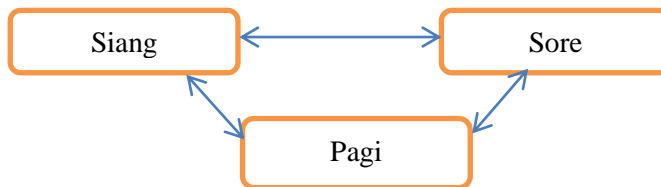


Gambar 1.2
Triangulasi dengan sumber data



Gambar 1.3
Triangulasi dengan Teknik Pengumpulan Data

⁴⁰ Ibid., hal 372.



Gambar 1.4
Triangulasi dengan Teknik Waktu Pengumpulan Data

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat uraian tentang landasan teori yang relevan dan terkait dengan tema penelitian.

BAB III DESKRIPSI OBJEK

Memuat secara rinci mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Memuat secara rinci mengenai analisa data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang simpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Teba Bunuk dalam penyusunan APBDes secara umum sudah cukup baik dalam menerapkan asas transparansi mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan pertanggungjawaban. Dalam hal implementasi asas akuntabel dan asas partisipatif, Pemerintah Desa Teba Bunuk sudah memenuhi semua indikatornya mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah. Aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus. Untuk laporan pertanggungjawaban APBDes sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun terkadang ada sedikit kesulitan pada saat adanya perombakan atau perubahan APBDes.
2. Pelaksanaan perspektif ekonomi Islam mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus sudah diterapkan dengan cukup baik hal ini didasarkan dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yaitu *Siddiq* (jujur), *fathanah* (cerdas), *Amanah* (dapat dipercaya), dan *Tabliq* (transparan) dapat di lihat dari nilai-nilai dasar yang telah dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Teba Bunuk diharapkan mampu lebih optimal dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dalam meningkatkan sisi transparansi yaitu dengan membuka informasi seluas-luasnya dengan membawa penyusunan APBDes dalam era digitalisasi

dengan membuat aplikasi atau website, sosial media yang dimana diharapkan dapat membuka dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi segala proses yang terjadi secara realita dan terupdate tanpa harus hadir dalam rapat tertentu.

2. Pemerintah Desa Teba Bunuk perlu meningkatkan transparansi dengan menempatkan lebih banyak informasi tentang *banner* APBDes di setiap lokasi pembangunan dan program yang dilakukan desa.
3. Desa Teba Bunuk perlu meningkatkan koordinasi antar staf perangkat desa dan pihak lain yang ikut andil dalam proses untuk mengoptimalkan segala proses baik dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban bisa berjalan sesuai dengan harapan, jika ada kendala yang disebabkan kompetensi staf dan seluruh perangkat desa belum bisa menggunakan jasa konsultan atau merekrut staf baru yang benar-benar memiliki skill dan kemampuan yang ahli dalam bidangnya sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan tidak ada kendala dalam segala proses penyusunan APBDes dimana berdampak besar terhadap percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga bisa merasakan manfaat dari dana desa tersebut.
4. Bagi Peneliti selanjutnya hendaknya menerapkan prinsip *good governance* dalam penyusunan APBdes Berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Diharapkan juga untuk memperluas objek penelitian dan menambah indikator yang berbasis dalam bidang akuntansi syariah pada penelitiannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Buku**2014, Undang-undang RI Permendagri Nomor 113 Tahun.
Pengelolaan Keuangan Direvisi Menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Permendagri, 2014.
- A. Kamayanti. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi*. Malang: Penerbit Peneleh, 2002.
- Agung D.E. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2017.
- Candra, Gustiman, Herlina Helmy, and Nayang Helmayunita.
“Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 1 (2019): 64–77.
- chabib Soleh dan Heru Rochmansyah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2014.
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2016.
- H. Moh.Pobundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis, Cet. Pertama*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Hamid, Ahmad, and Sulaiman Mukhlis Yunus. “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Bireun.” *Jurnal Manajemen Pascasarjana*. ISSN (2015): 199–2302.
- Hamzah, Ardi. *Tata Kelola Pemerintah Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera Dan Partisipatoris*. Surabaya: Pustaka, 2015.
- Handoko, Hani. *Manajemen, Edisi 2*. Yogyakarta: BPF, 2003.
- Hardikasari, E. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2006-2009*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011.
- IAN & BKKP. *Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citra Malang, 2005.
- Iqbal Hasan, MM. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian, Cet Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jamhari Ismanto. “Korupsi Mantan Kepala Pekon Di Tanggamus Di

- Penjara.” Tanggamus, Lampung, 2020. WARTA9.COM.
- Jefri, Riny. “Teori Stewardship Dan Good Governance.” *Economics Bosowa* 4, no. 3 (2018): 14–28.
- Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Kupas tuntas.co. “Korupsi Dana Desa Rp 500 Juta Oknum Kepala Pekon Jadi Tersangka Terancam 20 Tahun Penjara.” Tanggamus, Lampung, 2019.
- Lampungpro.co. “Humas Polres Tanggamus.” Tanggamus, 2021. <https://lampungpro.co/post/34088/gelapkan-rp2518-juta-mantan-pj-kakon-terdana-kota-agung-tanggamus-dijebloskan-ke-bui>.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet, VII*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- . *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Prof.Dr.Hj.Sedermayanti, M.Pd., APU. *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Pertama Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Prof.Dr.Hj.Sedermayanti, M.Pd. *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi Revisi*. Penerbit Mandar Maju, n.d.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rilah, Fitri Nur, and Nur Indah Riwijanti. “Integrasi Unsur Spiritualitas Dalam Prinsip Good Cooperative Governance: Revitalisasi Nilai Koperasi.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 5, no. 2 (2017): 159–176.
- Rosielita, Sulindawati, Sirnawati. “Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.” *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganेशha* Vol 8, no. 2 (2017): 70–71.

- Rosielita, Febby, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, and Ni Kadek Sinarwati. "Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 8, no. 2 (2017).
- S.hermawan and A. Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Media Nusa Creative, 2016.
- Sahya Anggara. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Saleh, Akhmad Hasan. "Sufi Governance: Aplikasi Ilmu Tasawuf Dalam Pemerintahan." *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015).
- Sartika, Novira, and M Lazuardi. "Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus : Desa Bantan Sari Dan Desa Deluk Kabupaten Bengkalis)." *Jurnal IAKP* 2, no. 1 (2021): 69–84.
- Sedermayanti. *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*. Alfabeta, 2016.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Cet Ke-20*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2012.
- Sumpeno, Wahjudin. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read, 2011.
- Superdi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UIII Press, 2005.
- Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintah*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2021.
- Tim Redaksi Laksana. *Himpunan Lengkap Perundang-Undangan Tentang Desa Dan Dana Desa*. Laksana, 2019.
- Tumbel, Satria Mentari. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan

- Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.” *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 6 (2017): 161029.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. *Desa Dan Pemerintah Desa Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Milik Desa*. BPKP, n.d.
- V.Sujarweni Wiratna. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- . *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Widianto, Andri, Ririh Sri Harjanti, Erni Unggul Sedyu Utami, and Yeni Priatna Sari. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sebagai Instrumen Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Kecamatan Brebes).” *ACCOUNT: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan* 5, no. 2 (2018).
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Wiratna Sujarweni. *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Zaman, Badrus, and Diah Nurdiwaty. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*. Vol. 5, 2020.

Internet

Jamhari Ismanto. “Korupsi Mantan Kepala Pekon Di Tanggamus Di Penjara.” Tanggamus,Lampung, 2020. WARTA9.COM.

Kupas tuntas.co. “Korupsi Dana Desa Rp 500 Juta Oknum Kepala Pekon Jadi Tersangka Terancam 20 Tahun Penjara.” Tanggamus,Lampung, 2019.

Lampungpro.co. “Humas Polres Tanggamus.” Tanggamus, 2021. <https://lampungpro.co/post/34088/gelapkan-rp2518-juta-mantan-pj-kakon-terdana-kota-agung-tanggamus-dijebloskan-ke-bui>.

Undang-undang

2014, Undang-undang RI Permendagri Nomor 113 Tahun. *Pengelolaan Keuangan Direvisi Menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*. Permendagri, 2014.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. *Desa Dan Pemerintah Desa Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Milik Desa*. BPKP, n.d.

